



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, P.O. BOX : 3480
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498
WEBSITE: bali.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-424/TU.020/H.12.16/04/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Rutin**

25 April 2025

Yth.
Seluruh Pegawai BRMP Bali

di
Tempat

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan semoga kita semua senantiasa dalam lindunganNya. Bersama ini kami sampaikan dan mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Pertemuan Besar BRMP Bali
Agenda : Rapat Rutin

Mengingat pentingnya acara ini, dimohon kehadiran Bapak/Ibu hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001

Tembusan, Yth.
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha untuk persiapannya.

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL	:	Rabu, 30 April 2025
PUKUL	:	09.00 WITA s/d selesai
TEMA/TOPIK BAHASAN	:	Rapat Rutin dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas BRMP Tahun 2025
PESERTA	:	ASN lingkup BRMP Bali
LOKASI	:	Ruang Pertemuan Besar BRMP Bali

RUMUSAN HASIL :

1) Plt. Kasubbag Tata Usaha BPSIP Bali, Bpk. Pekik Anggoro, S.P, M.Si (Pengantar),

- Agenda pertemuan pada hari ini terkait dengan Rapat Rutin Balai, berupa Informasi Kegiatan Balai oleh Bapak Plt. Kepala Balai, Laporan Kegiatan dari Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Laporan Kegiatan dari Tim Kerja Program dan Evaluasi BRMP Bali, serta sosialisasi mengenai Zona Integritas di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali.
- Pada pertemuan hari ini juga sekalian silaturahmi dan halal bihalal ASN lingkup BRMP Bali terkait Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Paskah, Hari Raya Galungan dan Kuningan.
- Selanjutnya mohon arahan dari Kepala Balai, terkait dengan agenda rapat yang dilaksanakan pada hari ini.

2) Arahan Plt. Kepala Balai : Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP,

- Laporan perkembangan kegiatan Luas Tanam padi Nasional per April 2025 sudah mencapai 1.254.244 Ha, untuk kegiatan LTT Provinsi Bali dibawah Penanggung Jawab Kabag Umum Ditjen TP sudah mencapai 7.747,73 Ha atau 69,12% (total LTT terhadap target LTT hari berjalan).
- Organisasi BSIP telah bertransformasi ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) berdasarkan Peraturan presiden Nomor 192 tahun 2024 dan Permentan Nomor 10 tahun 2025 yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
- Dengan adanya transformasi organisasi memberikan dampak kepada Perubahan Peta Jabatan, Dinamika anggaran, Publik Hearing, Teknis & administrasi (stampel, kop surat, plank kantor, website, medsos, dll).

- Pada tahun 2025 ini rencana kegiatan BRMP Bali berupa pendampingan LTT dan Produksi Benih (Kedelai, sapi, gandum, bawang putih) dimana untuk bawang putih direncanakan 10 Ha daerah Tabanan dan Buleleng.
- Selain hal diatas telah ditanda tangannya nota kesepahaman antara Kementan dengan Kemendiknas terkait Swasembada Pangan Berkelanjutan terhadap komoditas Padi, Jagung, Bawang Putih, Tebu, Sapi, Kedelai, Pupuk, Ubi Kayu, dan Gandum.

3. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di BRMP Bali, Plt. Kasubbag Tata Usaha BPSIP Bali, Bpk. Pekik Anggoro, S.P, M.Si

- Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

- Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
- Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan/zona/lingkup/kawasan/unit instansi.
- Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
- **Zona Integritas (ZI)** merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
- **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

- Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.
- Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.
- Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.
- Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.
- Efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.
- Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.
- Langkah awal dalam penancangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

- Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.



Pit Kasubag Tata Usaha,

Pekik Anggoro, S.P., M.Si.
NIP. 197805302007011001

Notulis,
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama,

Gina Deswita, S.T.
NIP. 198112132005012002

DOKUMENTASI KEGIATAN :



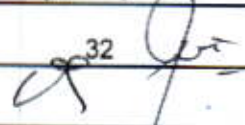
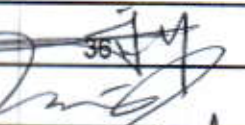
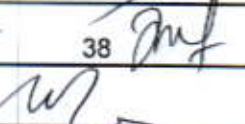
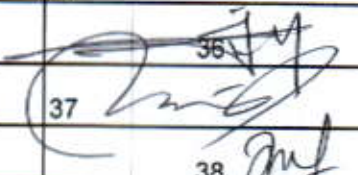
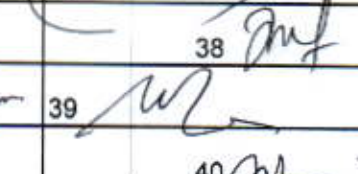
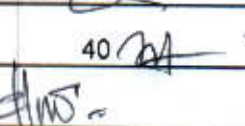
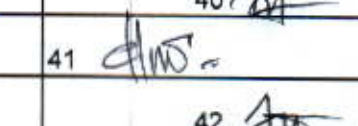
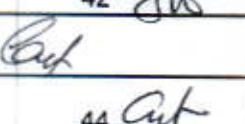
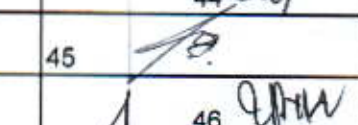
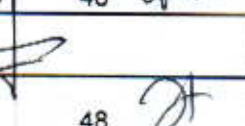
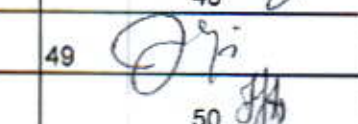
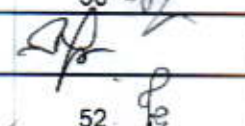
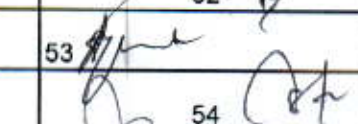
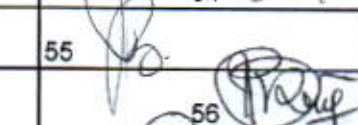
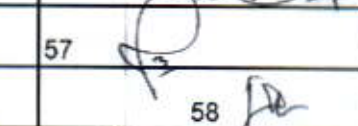
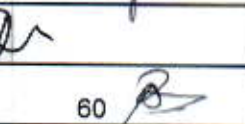
DAFTAR HADIR

TANGGAL : 30 April 2025

KEGIATAN : RAPAT RUTIN PEGAWAI BRMP BALI

TEMPAT : RUANG PERTEMUAN UTAMA BRMP BALI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Made Rai Jan	Plt. Ka. Balai	1
2	Petik Anggoro	Plt. Kasubag. TU	2
3	NIyoman Sugama	Tus Iraga Diseminasi	3
4	I Made Londra	Asta	4
5	I. Nidiantu	Panguluh	5
6	Comang Arya W.	Staf	6
7	Sagung A.N. Aryawati	Asta	7
8	I Wayan Sri Jarta	Staf	8
9	Ni Ketut Rasis Subrari	Panguluh Pertama	9
10	I Made Sukadana	Panguluh Pertama	10
11	Ni Ketut Sudarmini	- " -	11
12	Agung Priganto	- " -	12
13	I Nengah Damijan	- " -	13
14	MARDHIKA KUSUKA	Prokom	14
15	Ni Luh Gede Budhari	Asta	15
16	I Wayan Sumanjaya	Panguluh	16
17	NIyoman Anchan	Panguluh	17
18	N. Wertyasa	Staf	18
19	Dik Rai Praso	Panguluh	19
20	Ily Agman	Staf	20
21	GINA DESWITA	KEPEGAWAIAN	21
22	Ist Gantana	Staf TU	22
23	Dewi Supartiwi	Staf kepeg	23
24	Dw. Ayu Purwati	Staf	24
25	N. Arjuna	Asta	25
26	Puku Sugiana	Panguluh	26
27	I Gusti Iwaga Parwa	Panguluh	27
28	Dia Ayu Parwati	Panguluh	28
29	Ni Puhi Sutarni	Panguluh	29
30	I Ny Winarta	Kumpul tugas	30

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	Anella RKS	Asta	31 
32	Ibnu Agus Kusumirana	Melilit	32 
33	Ummu	-	33 
34	Ilet Sugastane	-	34 
35	Agus Suniara	Agus	35 
36	Pardi	Staf	36 
37	A A Murni Badny	Agro	37 
38	Nirosen Tambunan	Staf	38 
39	Eko Nugroho Dori	pengurus jaman	39 
40	Ketut Adicandi ko	-	40 
41	Ni Ketut Sukardi	-	41 
42	suniza tambunan	staf	42 
43	Dasakad Suratani	-	43 
44	Kadek Marisa	-	44 
45	I Ketut Dudianda	staf pengasaya	45 
46	Ni Wipar Wirmayani	staf	46 
47	Wign Partanta	-	47 
48	Pur Yosi Priningah	staf	48 
49	Ni Ketut Sudiani	staf	49 
50	IFTI Nur H	PBT	50 
51	I. Putu Ari Puranta	Asm Keuangan	51 
52	Vi kt Ari Tantri Yanti	Penguluh	52
53	MA Adhyanawati	PBI	53
54	I Me Astika	penguluh	54
55	Berlian	staf	55
56	Sriyanto	Penguluh	56
57	Igb Mardika	penguluh	57
58	Purni Suberta	pram jama	58
59	achmat	PMMP	59
60	Reza	TEKLIT	60

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
61	N. Made Restutarih	Staff	61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84
85			85
86			86
87			87
88			88
89			89
90			90
91			91
92			92
93			93
94			94
95			95
96			96
97			97
98			98
99			99
100			100